

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Desa merupakan kesatuan yang otonom dan memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur rumah tangga sendiri. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, desa tidak lagi merupakan level administrasi dan menjadi bawahan daerah, melainkan menjadi *Independent Community*, yang berarti masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan sendiri dan bukan kepentingan dari pemerintah atas ke pemerintah bawah. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 telah disahkan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 2013, setelah menempuh perjalanan hampir 7 tahun lamanya (2007-2013). Seluruh komponen bangsa menyambut sebagai kemenangan besar. Sebab, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi sebuah bukti komitmen Pemerintah Indonesia dan anggota DPR-RI untuk melindungi dan memperdayakan desa agar menjadi lebih mandiri, kuat dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Dalam era otonomi daerah saat ini, desa diberikan kewenangan yang sangat luas dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Pentingnya Peraturan Desa bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat desa,

serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

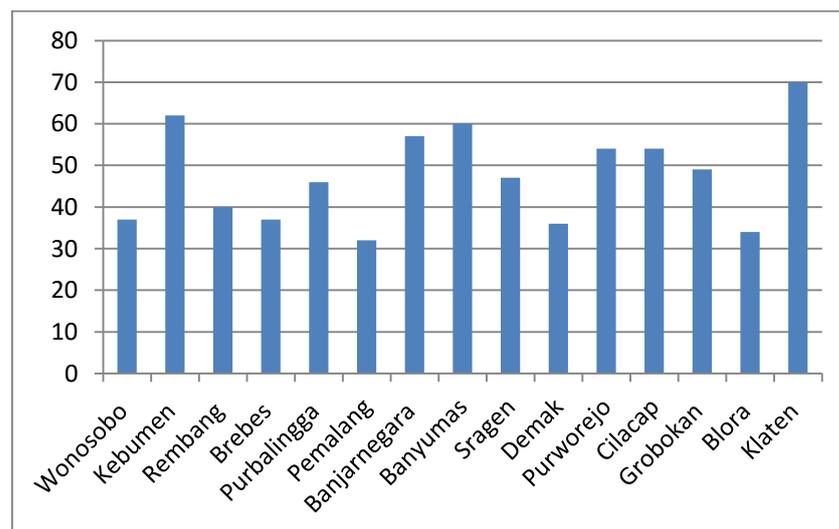
Ketika diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Indonesia, sebagian pihak telah banyak memberikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat terhadap perkembangan otonomi desa yang sebelumnya. Sekaligus dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 ini nantinya desa-desa di Indonesia mempunyai masa depan yang lebih baik pengaturannya dari pada Undang-undang sebelumnya yaitu : Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Desa, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah termasuk didalamnya mengatur tentang desa-desa di Indonesia.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memiliki sumber dana yang cukup besar untuk kemandirian masyarakat desa. Dana tersebut berasal dari 7 sumber pendapatan yakni : APBN, Alokasi Dana Desa (ADD), bagi hasil, pajak dan retribusi, bantuan keuangan dari Provinsi/Kabupaten dan Kota, hibah yang sah dan tidak mengikat. Jika dikelola dengan baik dan benar maka desa akan mendapatkan dana lebih dari 2,5 Milyar Rupiah.

Berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah banyak melakukan pembangunan di desa yang berguna untuk memandirikan dan mensejahterakan masyarakat. Pembangunan ini dilakukan oleh pemerintah Desa dengan keberanian mengkontruksi pembangunan dari bawah

atau *bottom up*. Masyarakat disini harus di beri kepercayaan yang baik sehingga desa bisa secara mandiri dapat melakukan pembangunan yang konsisten dan berkelanjutan. Hal ini mengingat karena banyak perosalanan yang ada di Indonesia, terutama dari lapisan masyarakat yang ada di pedesaan. Pemasalahan yang terjadi dipedesaan atara lain seperti penganguran, gizi buruk dan kemiskinan, bagaimana cara menangulangi permasalahan yang cukup pelik, seperti halnya contoh kemiskinan. Banyak kemiskinan yang terjadi di pedesaan, tidak sedikit masyarakat desa yang mengalami kemiskinan. Kemiskianan di Negara Indonesia merupakan masalah yang sangat banyak, hampir merata di wilayah Indonesia, salah satu wilayah miskin di pulau jawa adalah Jawa Tengah.

Table 1.1
Jumlah Desa Miskin Di Provinsi Jawa Tengah (2015-2016)



Sumber : Koran jateng.tribunnews.com, 5 Oktober 2017, 20.00 WIB

Menurut table 1.1 di atas Jawa Tengah merupakan, Provinsi Jawa Tengah memiliki 15 Kabupaten yang memiliki desa yang miskin. Paling banyak kabupaten yang memiliki desa miskin adalah Kabupaten Klaten, Kabupaten

Klaten memiliki 70 desa miskin. Salah satunya Desa yang ada di Kabupaten Klaten adalah Desa Candi Rejo Kecamatan Ngawen. Desa Candi Rejo Kecamatan Ngawen disebut miskin karena memiliki banyak janda dan masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sandang dan pangan.

TABEL 1.2

Persentase Angka Kemiskinan Di Jawa Tengah (2012-2016)

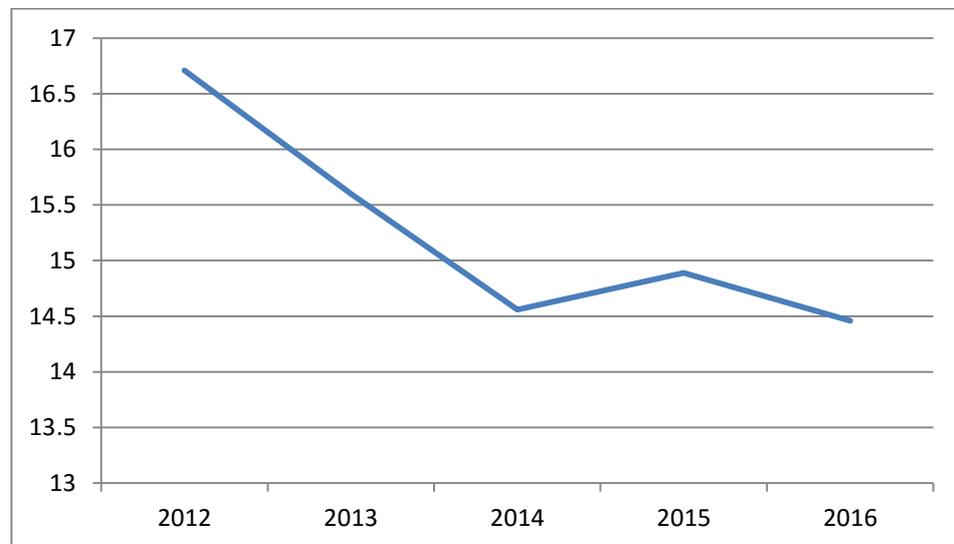


Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah dalam angka ,berbagai tahun terbitan, diakses pada tanggal 5oktober 2017, pada pukul 20.00 WIB

Menurut table 1.2 diatas, Jawa tengah pada tahun 2012 presentase kemiskinan hampir 15 % dari keseluruhan jumlah penduduk di Jawa Tengah. Namun pada tahun ketahun presentase kemiskinan terus mengalami penurunan. Pada tahun 2014 sampai 2016 presentase kemiskinan di Jawa Tengah mulai mendekati angka 13 %. Angka kemiskinan terus menerus menurun karena pemerintah Jawa Tengah memiliki banyak program pengentasan kemiskinan.

Table 1.3

Persentase Angka Kemiskinan Di Kabupaten Klaten (2012-2016)



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah dalam angka ,berbagai tahun terbitan.

Menurut table 1.3 Kabupaten Klaten telah dijelaskan prestase kemiskinan di Kabupaten Klaten tahun 2012 adalah 16.71 %, kemiskinan di Kabupaten Klaten merupakan desa terbanyak miskin di Jawa Tengah yang. Setiap tahun ke tahun Kabupaten memiliki program pengentasan kemiskinan. Sehingga pada tahun 2013 presentase kemiskinan kemiskinan turun 1.11% menjadi 15.60 % warga miskin di Klaten. Namun presentase turun tidak bertahan lama pada tahun 2015 naik 0,32% menjadi 14.86 yang semula di tahun 2014 adalah 14.56. Oleh karena itu pada tahun 2015 pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuat program Pilot proyek percepatan penentasan kemiskinan, karena Jawa Tengah presentase penduduk miskinnya lebih tinggi di banding presentase penduduk nasional. Oleh karena itu Kabupaten Rembang dan Kabupaten Klaten menjadi Pilot proyek. Sehingga pada tahun 2016 presentase angka kemiskinan berkurang. Pengentasan

kemiskinan berupa pemihakan dan pembinaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Di Kabupaten Klaten, wilayah atau pedesaan yang menjadi Pilot Proyek adalah Desa Candi Rejo, Kecamatan Ngawen. Menurut Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Desa Candi Rejo merupakan Desa yang memiliki peringkat pertama kemiskinan Provinsi Jawa Tengah itu berdasarkan pendataan tim percepatan penanggulangan yang terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jateng, Ketahanan Pangan Jateng, Dinas Kesehatan (Dinkes) Jateng, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Jateng, dan Bappeda Klaten. Hasil dari pendataan Desa Candi Rejo tergolong zona merah yang di dapat dari lima bidang kehidupan yakni pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, infrastruktur, dan ketahanan pangan. Kemiskinan bukan berarti dari mereka tidak mempunyai uang ataupun tidak memiliki biaya, tetapi mereka yang desanya banyak anak putus sekolah, banyaknya janda. Sedangkan kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (2017) kemiskinan adalah seseorang yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya . kemudian ada beberapa kriteria kemiskinan yang tidak dapat mampu memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu sandang pangan papan, tidak adanya akses dalam memenuhi kebutuhan dasar lainnya seperti kesehatan, pendidikan, sanitasi air bersih, tidak ada jaminan masa depan, kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun massa, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam, kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat, tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang

berkesinambungan, ketidak mampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental, dan yang terakhir Ketidak mampuan dan ketidak ketergantungan sosial dalam mengatasi anak-anak terlantar, wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil.

Padahal Pemerintah Kabupaten Klaten memiliki program pengentasan kemiskinan seperti RTLH, Pembagian RASTRA, Jaminan Kesehatan Masyarakat, dan lain-lain. Program hanya sedikit mengurangi presentase angka kemiskinan di Desa Candi Rejo Dengan adanya Pilot Projek juga masih belum mengurangi angka presentase kemiskinan yang ada. Kemudian pihak Pemerintah Desa Candi Rejo memberikan bantuan modal usaha berupa gerobak angkringan, yang berguna untuk memperdayakan masyarakatnya supaya mengurangi presentase angka kemiskinan yang hampir menyentuh zona merah. Bantuan gerobak itu sebanyak 13 gerobak untuk warga di 13 RW, nilai total setiap gerobak adalah sekitar 8 juta, dana tersebut di ambil dari dana desa sebesar 104 juta rupiah. Setiap gerobak terdiri dari 2 KK yang berkerja sama. Tahun 2016 sebanyak 130 orang menerima bantuan.

Dana desa berasal dari APBN yang berguna untuk membangun desa, setiap desa berhak menerima anggaran dalam bentuk rekening bukan program. uang tersebut berguna untuk melakukan pembangunan desa dalam bentuk fisik atau non fisik guna untuk memajukan dan mensejahterakan penduduk desa setempat. Oleh karna itu maka pemerintah Desa Desa Candi Rejo menggunakan Dana Desa untuk mensejahterakan masyarakat desanya.

Berdasarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Provinsi Jawa Tengah mendapatkan Dana Desa sejumlah 2.228.889.296 Triliun Rupiah, pada tahun 2015 dan dana tersebut dibagi 7809 desa yang ada di Jawa Tengah. Pada tahun 2016 Jawa Tengah mendapat kan tambahan Dana Desa sebesar 3 Triliun, sehingga Dana Desa yang di dapat Provinsi Jawa Tengah menjadi 5.002.426.341 Triliun Rupiah. Dana Desa yang diberikan di Kabupaten Klaten Sekitar 281, 692. 822 juta rupiah. Dana ini dibagi 391 desa yang ada di Kabupaten Klaten, dengan ketentuan tertentu seperti banyak nya orang miskin, dan susah di jangkau nya daerah. Dana tersebut akan terus bertambah dari waktu ke waktu. Sehingga Dana Desa yang digunakan akan bertambah banyak untuk pembangunan, pemerintahan, pemberdayaan, dan kesejahteraan sosial.

Alasan mengambil lokasi Candi Rejo, Kecamatan Ngawen karena Kabupaten Klaten merupakan salah satu kabupaten yang memilki presentase kemiskinan banyak kemudian Candi Rejo merupakan desa percontohan pilot project penentasan kemiskinan untuk Provinsi Jawa Tengah. Kemudian Candi Rejo juga mengguna Dana Desa untuk lebih membantu penentasan kemiskinan. Supaya bergunan untuk menentaskan atau mengurangi peresenatse daerah Candi Rejo.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka di temukan rumusan masalah sebagai berikut **“Bagaimana penggunaan Dana Desa untuk pengentasan kemiskinan Desa Candi Rejo Pada Tahun 2015 – 2016 ?”**

C. Tujuan dan manfaat penelitian

Tujuan penelitian dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penggunaan dana desa untuk pengentasan kemiskinan di Desa Candi Rejo.

2. Manfaat Penelitian

a) Manfaat teoritis

1. Memberikan tambahan wawasan dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat meningkatkan pengetahuan penulis dalam aplikasi dan teori.
2. Diharapkan dapat menambah referensi kepustakaan bagi mahasiswa.

b) Manfaat praktis

1. Sebagai acuan bagi peningkatan kepada pemerintah tentang keberhasilan penentasan kemiskinan,
2. Mengetahui apakah berhasil program yang menggunakan Dana Desa.

D. Studi Terdahulu

Mengambil studi terdahulu, berguna untuk membandingkan penelitian satu dengan penelitian yang lain. Ada 12 literatur yang dideskripsikan. Pertama Pemberdayaan Komunitas *Sector* Informal Pedagang Kaki Lima, Suatu Alternatif Penanggulangan Kemiskinan, Trisni Utami, Universitas Negeri Surakarta 2009. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengkaji PKL Surakarta, selama ini lebih baik atau tidak dan penelitian ini juga sebagai panduan penyusunan strategi lebih baik melakukan penataan PKL dan Sebagai pengkajian bersama untuk memecahkan permasalahan yang di hadapi pasca relokasi PKL. Menggunakan metode Pendekatan terhadap masyarakat, partisipatif, partisipasi *research* pendekatan dalam proses perancangan dan riset yang partisipatif. Menghasilkan Komunitas PKL kemudian komunitas sector informal bersama di perkotaan merupakan salah satu kelompok masyarakat yang marginal yang perlu di perdayakan, agar lebih mampu dalam hal kegiatan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup nya, proses pengambilan kebijakan dalam mengelola pasar notoharjo belum menyentuh pendekatan komunitas

Kedua Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan, Studi Kasus 335 Kabupaten Di Jawa Tengah, Adit Agus Prastyo UNDIP 2010. Metode penelitian yang diambil adalah Metodenya kuantitatif, data berasal dari BPS, dokumen, data sekunder adalah data deret waktu dalam jangka 2003 sampai 2007. Metode yang di gunakan analisis panel sebagai alat pengolahan data. Menghasilkan Metode Regresi pengaruh terhadap cukup layak di gunakan karena telah memenuhi syarat dan melawati uji. Uji koefisien R berpengaruh kepada

pertumbuhan ekonomi dan upah minimum pendidik, tingkat pengangguran terhadap kemiskinan.

Ketiga dari penelitian sebelumnya yang berjudul “Analisis pengaruh program pemerintah terhadap, kemiskinan rumah tangga di pedesaan melalui program BLT dan Reksa desa, Desa Cibitok Satu, Bogor, Jawa Barat. Leonard D. 2008. Penelitian ini bertujuan untuk mencari apakah factor penyebab banyaknya rumah tangga miskin dan wujud nyata dalam program BLT, reksa desa dan pengaruh kedua program. Metode yang digunakan adalah Kualitatif metode survei, pendekatan kualitatif untuk mengetahui gambaran kemiskinan rumah tangga, menggunakan kuisioner dan responden 40 orang. Hasil dari penelitian tersebut adalah Waraga Cibitok berpenghasilan 500.000 ribu rupiah. Disebabkan oleh dua faktor external dan internal. BLT sudah dijalankan sesuai ketentuannya.

Ke empat dari literature “Pengentasan Kemiskinan Dengan Kearifan Local Studi Kasus Di Pulau Buru Maluku Dan Surade Jawa Barat . Marcus . 2009”. Bertujuan untuk Untuk mencari *In sight* mengenai indicator kemiskinan, mencari alternative kebijakan, memahami kearifan local dalam hubungan upaya preventif menanggulangi kemiskian. Dengan metode kuisioner kuantitatif dan wawancara mendalam, riset serta diskusi kelompok. Pendekatan Participatoryrural Appraisal. Menghasilkan Kemiskinan banyak dilihat dari sisi mana saja dan sudut pandang mana saja, dan ditemukan konsep yang subjektif.

Ke lima dari tesis yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Dalam Wilayah Kecamatan

Tlogomulya Temanggung”, Tahun 2008. Agus Subroto, UNDIP. Penelitian ini bertujuan Untuk mendisksripsikan pengelolaan ADD, mengetahui penyebab ADD yang belum memenuhi ketentuan. Menggunakan metodologi deskrtif kualitatif menggambarkan gambaran yang senyatanya dari fenomena yang terjadi. hasil dari penelitian tersebut adalah perancangan program ADD memasuki tahap pembangunan banyak masyarakat yang turut berpartisipasi, reponsif dan juga sudah menerapkan prinsip –prinsip seperti tansparan, responsive dll. Administrasi desa nya cukup baik tetapi potensi SDM kendala utamanya.

Enam penelitian yang berjudul “Pelebagaan Bumdes Sebagai Potensi Ekonomi Desa Alam Upaya Pengntasan Kemiskinan Kabupaten Donggala”. Di tulis oleh Muh. Sayuti pada tahun 2011. Penelitian ini bertujuan untuk penjabaran kebijakan melalui Perda, Perdes kea rah terbentuk nya lembaga desa yang searah structural dan sosial dapat di berdayakan secara tepat . penelitian ini menggunakan metode Menggunakan deskriptif kuanlitatif, menggunakan populasi sampling dan populasi sasaran. Hasil dai penelian tersebut adalah pemberadaayn harus memiliki strategi khusus. Wujudnya harus dilihat dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pembangunan. BUMDes menjadi salah satu sebuah intusi dalam memperdayakan masyarakat.

Penelitian ke tujuh yang berjudul “Penguatan Kebijakan Public Usaha Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembanagn Industry Olahraga”. UNS penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2011 oleh Agus Krisyanto. Memilkiki tujuan anatar lain untuk mengetahui respon actual para pelaku sektor rill industry mikro olahraga. Metode penelitian yang dipakai antara lain deskritif, pendekatan

survey, survey yang dilakukan pada beberapa kota Di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah Dan Jawa Barat. Pembagian wilayah pada penelitian ini menggunakan teknik sampling. Hasil dari penelitian tersut adalah kepuasan pelaku usaha mikro olahraga terhadap kinerja pemerintah daerah atas delapan dimensi iklim usaha bervariasi industry olahraga . secara factual memberikan kelapangan pekerjaan sebagian masyarakat, namun belum berdampak besar untuk pengentasan kemiskinan.

Penelitian ke delapan yang berjudul “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Pengetasan Kemiskinan Memalalui Peningkatan Pembangunan Manusia, Di Provinsi Jawa Tengah” pada tahun 2011. Penulis oleh Widodo, Waridin, Johana, UNDIP. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pola perkembangan perkembangan pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan sebagai *indicator* pembangunan manusia dan *indicator* kemiskinan. Peran IPM dalam kaitan antara pengeluaran pemerintahan di sektor pendidikan dan kesehatan dengan pengentasan kemiskinan. Metode penelitian ini antarlain menggunakan tiga variable, menggunakan teknik analisis statistic deskriptif dan teknik analisis kuantitatif. *Statistic* deskriptif menggunakan gambaran yang dilihat rata- rata standar devian, max, minimum, range, dan lain lain. Data yang di gunkan adalah adata runtun dari tahun 2007- 2008 pencapaian kinerja indicator kabupaten atau kota. Hasil yang di dapat kan adalah alokasi pengeluaran sektor *public* mempengaruhi IPM, karena dilihat dari sektor pendidikan dan kesehatan tidak bisa berdiri sendiri dalam mempengaruhi kemiskinan.

Penelaah pelitian kesembilan yang berjudul “Analisis Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan Didaerah Istimewa Yogyakarta”, pada tahun 2015. Ditulis oleh P Saragi. Penelitian ini bertujuan untuk upaya penghapusan kemiskinan yang didukung oleh kebijakan pemerintah, baik pusat atau daerah, dana yang tersedia tidak menghasilkan penurunan yang signifikan angka kemiskinan. Metodologi yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan cara menganalisa data sekunder yang relevan dan jenis penelitiannya adalah kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut adalah pemerintah DIY terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi untuk penduduk miskin di daerahnya. Keterbatasan dan ketidakberdaanya penduduk miskin itu sangat sulit untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Penelaah ke 10 yang berjudul “Efektifitas Dan Pengaruh PNPM Mandiri Perdesaan Alokasi Dana Desa Pendapatan Asli Desa Dan Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kepala Keluarga Miskin Di Kabupaten Kebumen Tahun 2009 – 2011”. Ditulis oleh Prihatini Budi pada tahun 2011. Penelitian ini bertujuan Untuk mengathui efektifitas pengaruh simpan pinjam SPP dan non SPP, add, PADs dan jumlah keluarga miskin 2009-2011. Menggunakan metodologi penelitian kuantitatif deskriptif subjek penelitian desa yang menerima dana PNPM. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder di peroleh dari intansi yang bersangkutan. Hasil dari penelitian tersebut adalah variable PNPM mandiri pedesaan SPP pengaruh secara positif dan signifikan terhadap jumlah KK miskin . PNMP non SPP pengaruh negative tetap tidak signifikan ADD pengaruh negative dan

signifikan terhadap kk miskin PADs berpengaruh negative dan signifikan terhadap KK miskin.

Studi terdahulu yang ke 11 yang berjudul “Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur (Studi Kasus Desa Gilingharjo, Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul)” Pada Tahun 2015 Oleh Suluh Milati. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan evaluasi pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa Gilingharjo pada tahun 2015. Metode penelitiannya adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, narasumbernya adalah aparat desa, kepala dukuh. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa pembangunan infrastruktur desa Gilingharjo, melibatkan kepada kemampuan dan sumberdaya manusia yang dimiliki masyarakat sehingga pembanguann yang terlaksana sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.

Studi terdahulu yang terakhir ini berisi tentang “Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep” Yang Di Tulis Oleh Risma Hafid Pada Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan Dana Desa di gunakan sesuai dengan program, hasil-hasil dari pemanfaatan dana desa dan keterlibatan masyarakat desa. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan deskriptif kualitatif, pengumpulan data dengan wawancara kepada informan. Hasil dari penelitian tersebut adalah pembangunan desa mangilu kecamatan Bungoro kabupaten Pangkep efektif dapat dibuktikan dengan adanya jumlah program- program pembangunan pemerintahan desa melalui musrembang keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan

pemanfaatan dana desa di Mangilu sudah cukup baik, dimana masyarakat sudah ikut serta dalam penyusunan rencana pembangunan sampai dengan pelaksanaan.

Table 1.4
Studi Terdahulu

No	Judul penelitian, Nama Peneliti, dan Tahun penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Pemberdayaan Komunitas <i>Sector</i> Informal Pedagang Kaki Lima , Suatu Alternatif Penanggulangan Kemiskinan, Trisni Utami, Universitas Negeri Surakarta 2009	Untuk mengkaji PKL Surakarta , memecahkan permasalahan yang di hadapi pasca relokasi PKL. Menyusun model pemberdayaan pengentasan kemiskinan	Pendekatan terhadap masyarakat , partisipatif, partisipasi research pendekatan dalam proses perancangan dan riset yang partisipatif	Komunitas PKL kemudian komunitas sector informal bersama di perkotaan merupakan salah satu kelompok masyarakat yang marginal yang perlu di perdayakan, agar lebih mampu dalam hal kegiatan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup nya , proses pengambilan kebijakan dalam pengelolaan pasar notoharjo belum menyentuh pendekatan komunitas
2.	Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan , Studi Kasus 335 Kabupaten Di	Analisis pengaruh ekonomi , upah minimum pendidikan dan pengaguran terhadap	Metodenya kuantitatif , Metode yang di gunakan analisis panel sebagai alat pengolahan	Metode Regresi pengaruh terhadap cukup layak di gunakan karean telah memenuhi syarat dan melawati

	Jawa Tengah ,Adit Agus Prastyo UNDIP 2010.	tingkat kemiskinan	data .	uji.
3.	Analisis pengaruh program pemerintah terhadap , kemiskinan rumah tangga di pedesaan melalui program BLT dan Reksa desa, Desa Cibitok Satu , Bogor, Jawa Barat. Leonard D. 2008	Faktor kemiskinan yang menyebabkan banyak rumah tangga miskin. Wujud nyata dari program BLT dan Raksa Desa. Kan pengaruh keduanya	Kualitatif metodee surve, pendekatan kualitatif dan kuisoner	Waraga Cibitok berpenghasilan 500.000 ribu rupiah. Disebabkan oleh dua faktor external dan internal. BLT sudah dijalankan sesuai ketentuannya
4.	Pengentasan Kemiskinan Dengan Kearifan Local Studi Kasus Di Pulau Buru Maluku Dan Surade Jawa Barat . Marcus . 2009	mencari In sight mengenai indicator kemiskinan , mencari alternative kebijakan ,	Dengan kuisoner kuantitatif dan wawan cara mendalam, riset serta diskusi kelompok. Pendekatan Participatoryrural Appraisal.	Kemiskinan banyak dilihat dari sisi mana saj dan sudut pandang mana saja . dan ditemukan konsep yang subjektif
5.	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulya Temanggung Tahun 2008. Agus Subroto. UNDIP	Untuk mendisksripsikan pengolaan ADD , mengetahui penyebab ADD yang belum memenuhi ketentuan	Deskriptif kualitatif dan pendekatan fenomologi	Perancanagn program ADD banyak masyarakat berpartisipasi dan sudah merapkan prinsip-prinsip
6.	Pelebagaan Bumdes Sebagai Potensi Ekonomi Desa Alam Upaya Pengntasan Kemiskinan Kabupaten Donggala . Muh. Sayuti. 2011	Menjelaskan tentang kebijakan perda tentang lembaga desa untuk pemberdayaan	Menggunakan deskriptif kuanlitatif, menggunakan populasi samling dan populasi sasaran	Pemberdayaan dan kewirausahaan memerlukan strategi khusus. Pelaksanaan cukup baik
7.	Penguatan	Mengetahui	Metode,	Hasil kepuasan

	Kebijakan Publik Usaha Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembanagn Industry Olahraga. UNS. 2011. Agus Krisyanto	respon actual para pelaku setor rill industry mikro olahraga	deskritif ,survey dan menggunakan teknik sampling kuantitatif	pelaku usahaterhadap pemerintah cukup puas namun tidak dapat menentaskan kemiskian
8.	Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Pengetasan Kemiskinan Memalalui Peningkatan Pembangunan Manusia , Di Provinsi Jawaengah . 2011. Widodo, Waridin , Johana, UNDIP	Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Pengetasan Kemiskinan Memalalui Peningkatan Pembangunan Manusia , Di Provinsi Jawaengah . 2011. Widodo, Waridin , Johana, UNDIP	Variable ada 3, Teknik analisis nya ada 3 deskritif dan teknik analisis kuantitatif	Alokasi pengeluaran sektor public mempengaruhi IPM
9.	Analisis Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan Didaerah Istimewa Yogyakarta . 2015. P Saragi	Bagaimana Upaya pemberantasan kemiskinan yang didukung pemerintah , baik pemerintah daerah dan pusat, tidak mengasilkan penurunan angka kemiskinan yang signifikan.	Deskritif analisis	Sudah berupaya pemerintahnya namun ketrbatasan finansial dan ketidakberdaayaan penduduk itu membuat sulitnya pemeberantasan kemiskinan.
10	Efektifitas dan pengaruh PNPM Mandiri perdesaan	Untuk mengathui efektifitas	Kualitatif deskritif, dan jenis datanya	Bahwa 3 variable itu menghasilkan

	Alokasi dana desa pendapatan asli desa dan jumlah penduduk terhadap jumlah kepala keluarga miskin di kabupaten Kebumen tahun 2009 – 2011 . prihatini budi . 2011	pengaruh simpan pinjam SPP dan non spp, add, PADs dan jumlah keluarga miskin 2009-2011	data sekunder	pengaruh yang berbeda beda
11	Evektifitas Pemanfaatan Dana Desa Untuk pembangunan infrastruktur (Studi Kasus Desa Gilingharjo,Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul)” Pada Tahun 2015 Oleh Suluh Milati.	Untuk mendeskripsikan evaluasi pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa	Kualitatif deskriptif	penelitian tersebut adalah bahwa pembangunan infrastruktur desa Gilangharjo, melibatkan kepada kemampuan dan sumberdaya manusia yang di miliki masyarakat sehingga pembanguann yang terlaksana sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.
12.	Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep” Yang Di Tulis Oleh Risma Hafid Pada Tahun 2016.	bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan Dana Desa di gunakan sesuai dengan program	Deskriptif Kualitatif	pembangunan desa mangilu kecamatan Bungoro kabupaten Pangkep efektif dapat dibuktikan dengan adanya jumlah program-program pembangunan pemerintahan desa

Melihat penelitian sebelum-sebelumnya perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah perbedaan variable peneliti dimana penelitian ini mengkaji pemanfaatan Dana Desa Untuk Pengentasan Kemiskinan di Candi Rejo. Biasanya banyak penelitian terdahulu yang hanya meneliti pembangunan dan implementasi Dana Desa, dan penelitian sebelumnya tidak ada mengkaitkan dengan Kemiskinan. Banyak nya hanya pengalokasian Dana Desa untuk kemiskinan. Banyak juga penelitian yang mengaitkan pengentasan kemiskinan bukan dengan Dana Desa.

E. Kerangka Teori

1. Dana Desa

a) Pengertian

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan wilayah desa adalah anggaran pembangunan yang secara khusus dianggarkan dalam APBD, untuk pembangunan wilayah pedesaan dalam bentuk Alokasi Dana Desa. Menurut Nunuk (2016), Alokasi Dana Desa adalah salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintah yaitu hubungan keuangan antar pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa, untuk merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang di miliki pemerintah desa.

Sedangkan menurut Siti dan Tjahjani (2016), Alokasi Dana Desa Adalah dana yang dilakoasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa

yang bersumber dari bagiana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh kabupaten. Alokasi Dana Desa adalah dana yang cukup signifikan bagi desa yang menunjang program-program desa.

Direktoral Jendral Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa Menyatakan bahwa Dana Desa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan *public* Desa, memajukan perekonomian Desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar Desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa, yang disebut dengan Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembengunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa, Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara, yang pada pasal 1 ayat 2 menjelaskan Dana desa adalah dana yang bersumber dari sebuah anggaran pendapatan dan belanja Negara yang di peruntukan bagi desa di transfer memalui anggaran pendapatan balanja daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembinaan kemasyarakatan,

dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa adalah merupakan kewajiban Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer ke Desa di dalam APBN sebagai wujud pengakuan dan penghargaan Negara kepada Desa. Prioritas penggunaan DD diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Dana Desa adalah salah satu hal yang sangat krusial dalam Undang-Undang Desa, Perhitung anggaran yang diterima berdasarkan jumlah desa yang dipertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa. Sedangkan menurut Kementrian Keuangan *Republic* Indonesia(2017), Dana Desa adalah dana diberikan Oleh Pemerintah Pusat, Kepada Pemerintah Desa. Dana tersebut berguna untuk kesejahteraan, menciptakan lapangan kerja, mengatasi kesenjangan, dan mengentaskan kemiskinan.

Menurut Eko, Dkk(2016) , perbedaan Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa adalah Dana Desa merupakan kewajiban pemerintah pusat untuk mengalosikan anggaran transfer ke Desa dalam APBN sebagai wujud pengakuan dan penghargaan Negara kepada Desa. Sedangkan Alokasi Dana Desa adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten atau kota untuk mengalokasikan anggaran untuk Desa yang diambilkan dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan dana perimbangan.

2. Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Menurut KBBI (2015) adalah sebuah proses, cara, perbuatan yang menggunakan sesuatu, pemakaian. Sedangkan menurut Permendes Nomor 21 Tahun 2015, Dana Desa Adalah, dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang di peruntukan lagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, melakukan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa memiliki prioritas penggunaan, penggunaan dana desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dana desa. prioritas tersebut telah di atur dalam Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, yang beisi sebagai berikut :

- a) Dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa
- b) Dana desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- c) Program kegiatan yang dimaksud adalah seperti BUMDes, BUMDesa bersama, embung, produk unggulan desa, kawasan

pedesaan, sarana olahraga. Sedangkan pembangunan desa yang dimaksud adalah bagian publikasi kepada masyarakat di ruang public yang mudah diakses oleh masyarakat desa.

Ada pun peraturan prioritas penggunaan Dana Desa yang bertujuan untuk, memberikan referensi program dan kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal yang berskala desa dan di biayai oleh desa. Memberi acuan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk menyusun pedoman teknis penggunaan dana desa, kemudian diserahkan kepada pemerintah pusat untuk dilakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan dana desa.

Berdasarkan Permendes Nomor 22 Tahun 2016, Adapun Prinsip-prinsip penggunaan dana desa Yaitu :

- a) Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
- b) Kebutuhan Prioritas, mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa;
- c) Kewenangan desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa;
- d) Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat;

- e) Swakelola dan berbasis sumberdaya desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan ketrampilan warga desa dan kearifan local ;
- f) Tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

Sedangkan prioritas penggunaan dana desa berdasarkan Permendesa Nomor 21 Tahun 2015 antarlain :

- a) Pembangunan desa

Untuk mensejahterakan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, di arahkan dalam pelaksanaan program pembangunan desa antara lain pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan pra sarana untuk penghidupan pembangunan kesehatan pendidikan sosial budaya pengembangan usha ekonomi masyarakat meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi

- b) Pemberdayaan masyarakat

Untuk meningkatkan kapasitas warga dalam pengembangan wirausaha peningkatan pendapatan serta perluasan skala ekonomi individu atau kelompok masyarakat dan desa.

Sedangkan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2014, penggunaan Dana desa meliputi pembiayaan antara lain :

- a) Penyelenggaraan Pemerintah
- b) Pembangunan
- c) Pemberdayaan Masyarakat
- d) Kemasyarakatan

Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara pasal 19 ayat 2 *“Pada prinsipnya Dana Desa di alokasikan dalam APBN untuk mebiayai kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa. Namun untuk mengoptimalkan Penggunaan Dana Desa sebagaimana diamanatkan Undang-undang. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam rangka pengentasan masyarakat miskin, Dana Desa juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer pangan, sandang, dan papan masyarakat. Pembangunan Dana Desa untuk Kegiatan yang tidak di prioritaskan dapat dilakukan sepanjang kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi”*

Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja, Pelaksanaan Dana Desa dilakukan dua hal yaitu dengan cara swakelola dengan menggunakan tenaga dari masyarakat setempat dan peningkatan daya beli masyarakat agar tetap terjaga dan mendorong kegiatan-kegiatan masyarakat yang produktif secara ekonomi. Sedangkan pihak Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota mengawasi penetapan prioritas penggunaan dana desa agar tidak terjadi kecurangan penggunaan Dana Desa. Agar penggunaan Dana Desa tepat sasaran, dan berguna bagi masyarakat desa.

3. Pertanggung jawaban

Menurut Eko, S dan Dkk (2016) Pemerintah desa bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan dan pertanggung jawaban Dana Desa, baik untuk kegiatan prioritas pembangunan desa maupun pemberdayaan masyarakat Desa. Camat sebagai SKPD bertanggungjawab melakukan Fasilitasi teknis agar pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Desa berjalan lancar. Hal ini akan berajal baik apabila Camat menerima delegasi kewenangan yang spesifik berdasarkan Perbub/walikota.

Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Bab VI mengenai Pelaporan. Kepala Desa Menyampaikan laporan Realisasinya tentang penggunaan Dana Desa

kepada Bupati atau Walikota setiap Semester. Penyampaian laporan dengan ketentuan :

- a) Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan
- b) Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Setelah itu bupati atau walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa kepada menteri dengan tembusan menteri yang menangani Desa. Menteri teknis atau lembaga pimpinan lembaga pemerintah non kementerian yang terkait dengan gubernur paling lambat minggu bulan maret tahun anggaran berikut dan laporan dilakukan setiap tahun. Jika Desa tidak atau terlambat untuk menyampaikan laporan, maka Bupati atau Walikota menunda penyaluran Dana sampai dengan disampaikan nya laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

2 . Kemiskinan

a) Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan menurut *World Bank* (2010) adalah kemiskinan sebagai kekurangan dalam kesejahteraan, dan terdiri dari banyak dimensi. Ini termasuk berpenghasilan rendah dan ketidakmampuan untuk mendapatkan barang dasar dan layanan yang diperlukan untuk bertahan hidup dengan martabat. Kemiskinan juga meliputi rendahnya tingkat

kesehatan dan pendidikan, akses masyarakat miskin terhadap air bersih dan sanitasi, keamanan fisik yang tidak memadai, kurangnya suara, dan kapasitas memadai dan kesempatan untuk hidup yang lebih baik itu. Sedangkan Kemiskinan menurut Menurut Liutami, dkk, (2013) kemiskinan adalah penyakit sosial ekonomi yang tidak hanya dialami oleh negara-negara berkembang melainkan juga dialami oleh negara maju.

Kemiskinan adalah dimana seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok, sandang pangan nya. Tetapi mereka juga tidak bisa mengakses kesehtan, pendidikan dan fasilitas lain nya. Pengentasan Kemiskinan adalah upaya yang dilakukan untuk menangani masalah pokok dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di suatu tempat. Pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan cara stabilitas harga, program subsidi, bantuan social dan Dana Desa, serta pemberdayaan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI (2017) Penentasan berasal dari kata peng-entas-an, yang artinya adalah proses, cara, perbuatan mengentas atau mengentaskan. Sedangkan kemiskinan menurut Siregar Dan Wahyuniarti Selanjutnya Supriatna (1997) mengemukakan lima karakteristik penduduk miskin, antara lain:

- a) Tidak memiliki faktor produksi sendiri.
- b) Tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri.
- c) Tingkat pendidikan pada umumnya rendah.
- d) Banyak diantara mereka tidak mempunyai fasilitas .

- e) Diantara mereka berusia relatif muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan yang memadai.

Golongan orang miskin ditentukan pada lapisan terbawah dari masyarakat. Konsep orang miskin, lebih terkenal konsep golongan miskin, golongan lemah, golongan terbawah dari masyarakat. Subjek kemiskinan mencakup lapisan terbawah dari masyarakat, yang pekerjaannya meliputi petani yang berlahan sempit, buruh industry kecil, pengangguran. Penyebab seseorang pada posisi bawah ialah ketidaksamaan social, yang bersumber dari ketidaksamaan akses dari beberapa aspek, seperti pola mencari nafkah, pendidikan, kesehatan, semua itu di sebabkan akses kehidupan yang tidak merata di dalam masyarakat.

Kebutuhan pokok dapat diterjemahkan dalam suatu paket barang dan jasa yang diperlukan oleh setiap orang untuk bisa hidup secara manusiawi. Paket ini terdiri dari komposisi pangan bernilai gizi yang cukup dengan nilai kalori dan protein yang sesuai dengan tingkat usia, jenis kelamin, jenis pekerjaan, keadaan iklim dan lingkungan yang dialaminya serta sandang, papan dan terutama pangan.

Menurut Bank Dunia Bank Dunia (2014) yang dikutip oleh Prayitno (2014:98-99) menjelaskan bahwa kemiskinan telah menunjukkan bahwa adanya tiga dimensi (aspek atau segi), yaitu : pertama, kemiskinan itu multidimensional. Artinya karena kemiskinan itu bermacam-macam sehingga memiliki banyak aspek. Kedua, aspek-

aspek kemiskinan tadi saling berkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan ketiga, bahwa yang miskin adalah manusianya, baik secara individual maupun secara kolektif.

Jenis kemiskinan menurut Tadjudin (2007) membagi kemiskinan menjadi 3 jenis varian yang berbeda yaitu : kemiskinan ekonomi, kemiskinan social, kemiskinan politik, sedangkan menurut Nurhadi (2007) kemiskinan memiliki berbagai dimensi yang menyangkut aspek ekonomi, politik, dan *social* psikologis. Maka dapat di simpulkan dari kedua pendapat tersebut jenis kemiskinan antarlain : ekonomi, politik dan social –psikologis :

a) Kemiskinan ekonomi

Menurut ekonomi, kemiskinan dapat di definisikan sebagai kekurangan sumberdaya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, berguna untuk meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang, hal ini tidak menyangkut masalah keuangan, tetapi juga dalam hal kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b) Kemiskinan Politik

Kemiskinan politik bearti kekurangan akses kekuatan politik yang menentukan sebuah kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan kekuasaan

c) Kemiskinan *Social – Psikologis*

Kekurangan akses jaringan dan structural social yang mendukung peningkatan produktivitas yang di sebabkan oleh *factor-factor* penghambat yang menghalangi seseorang memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada didalam masyarakat.

Sedangkan menurut Suharto (2005), kemiskinan di bagi menjadi satu dimensi dalam KTT di Denmark, dimensi itu adalah dimensi pembangunan social, yang memuat 3 tipologi kemiskinan yaitu :

a) Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah sebuah keadaan miskin yang diakibatkan ketidak mampuan seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi kebutuhan pokok nya seperti sandang pangan papan, kesehatan, pendidikan, yang di ukur melalui garis kemiskinan atau batas kemiskinan, yang berupa indicator tunggal seperti nutrisi, kalori, beras, pendapatan, pengeluaran, dan kebutuhan dasar.

b) Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif adalah sebuah keadaan miskin yang di alami individu atau kelompok dibanding dengan kondisi umum suatu masyarakat. Misalnya jika pendapatan seseorang berada di atas batas garis kemiskinan maka belum tentu dikatakan miskin, jika belum dibandingkan dengan warga setempatnya.

c) Kemiskinan kultural

Kemiskinan ini mengacu pada gaya hidup, nilai, orientasi social budaya seseorang atau masyarakat yang tidak sejalan dengan masyarakat modern. sikap yang mencirikan kemiskinan kultural antara lain : sikap malas, enggan berpresntasi, enggan masalalu berorientasi dan berjiwa *entrepreneur*.

d) Kemiskinan Struktural

Kemiskinan structural adalah kemiskinan yang di sebabkan oleh ketidakadilan struktur, baik struktur politik, social, maupun ekonomi yang tidak memungkinkan. Seseorang kelompok untuk menjangkau sumber sumber penghidupan padahal sudah tersedia.

Sedangkan kemiskinan menurut Mas'oed (Huri, dkk;2008) mendefiniskan kemiskinan lebih luas dan bisa di bagi menjadi 5 jenis, antara lain:

- a) Kemiskinan *Interstitial*, adalah sebuah kondisi deprivasi material aliensi mendorong timbulnya kantong–kantong kemiskinan yang dikelilingi oleh para pemilik kekayaan, kekuasaan dan aset laina yang besar.
- b) Kemiskinan *Peripheral*, adalah kemiskinan yang terdapat di wilayah-wilayah pinggiran dan terjadi akibat deprivasi meteriil yang berlangsung dalam keadaan isolasi dan aliensi

- c) Kemiskinan *Overcrowding*, deprivasi materiil akibat desakan kependudukan dan kelangkaan sumberdaya akan mendorong timbulnya aliansi dan kemiskinan jenis ini
- d) Kemiskinan *Sporadic* atau traumatic adalah kemiskinan yang timbul akibat adanya bencana alam seperti kemarau panjang, hilangnya pekerjaan.
- e) Kemiskinan *Edemik* bisa muncul karena akibat aliansi, deprivasi tekologis, ketergantungan dan kelangkaan asset.

Kemiskinan merupakan kasus yang memerlukan perhatian yang serius untuk pemerintah, karena kemiskinan sudah dimulai dari berabad-abad lalu. Menurut Prayitno dan Arsyad (1987) kemiskinan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Masyarakat yang keadaannya miskin pada umumnya mereka tidak memiliki produksi sendiri, seperti tanah yang cukup, modal atau ketrampilan yang memadai. Sehingga kemampuan tersebut dapat menghambat penghasilan masyarakat.
- b) Masyarakat tidak memiliki kemampuan memperoleh asset produksi dengan kekuatan sendiri, karena pendapatannya tidak cukup untuk modal usaha
- c) Tingkat pendidikannya pada umumnya rendah, pada umumnya masyarakat miskin pendidikannya hanya tamatan Sekolah Dasar, karena waktu mereka habis untuk berkerja guna mencukupi kehidupannya.

d) Banyak diantara mereka yang hidup di kota, masih berusia muda dan tidak memiliki *skill* yang cukup atau pendidikan. Sedangkan di kota tidak siap menampung gerakan urbanisasi dari desa yang tidak memiliki potensi apapun.

Sedangkan menurut Soeharto (Rustanto:2015) ciri-ciri kemiskinan adalah sebagai berikut:

- a) Tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar
- b) Tidak mampu berusaha karena sakit, cacat fisik, atau mental
- c) Tidak mampu berfungsi social
- d) Rendahnya sumberdaya manusia
- e) Rentang terhadap guncangan baik individu atau pun terhadap masa
- f) Tidak adanya akses terhadap lapangan kerja dan mata pencarian yang berkesinambungan
- g) Tidak adanya akses terhadap kebutuhan dasar lainnya, seperti kesehatan
- h) Tidak ada jaminan masa depan dan tidak terlibat dalam kegiatan dalam masyarakat.

Penyebab kemiskinan adalah karena strategi pembangunan yang dirancang oleh pemerintah lebih bertitik tumpu pada pertumbuhan ekonomi yang semakin mengakibatkan kesenjangan antara masyarakat golongan miskin dan golongan kaya. Penyebab kemiskinan menurut Oscar Lewis (Nurhadi *dalam* Yunus, 2008),

bahwa factor penyebab kemiskinan adalah factor kebudayaan yang dapat merubah sebuah tatanan social masyarakatitu sendiri, sehingga bis berintegrasi ke dalam masyarakat luas, cenderung menyerah pada nasib, tingkat pendidikan yang rendah, tidak memiliki etos kerja, daya juang yang rendah, berfikir jangka pendek tidak memikirkan jangka panjang.

b) Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan adalah masalah yang dari tahun ketahun selalu ada, untuk pengentasan kemiskinan, perlu adanya dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat secara komperensif, konsep pemberdayaan menurut Frienment (Huri:2008), muncul kepermukaan ada dua premis, yaitu kegagalan dan harapan. Kegagalan yang dimaksud adalah kegagalan dalam model-model pembangunan ekonomi dalam menggulangi kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan. Sedangkan harapan muncul disaat karena adanya alternatif pembangunan yang memasukan nilai-nilai demokrasi persamaan gender, persamaan antar generasi dan pertumbuhan ekonomi yang memadahi.

Untuk mengurangi dan pengentasan kemiskinnann perlu dilakukannya pemberdayaan yang berdaya sekiranya dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat yang lebih komperensif serta berorientasi lebih jauh kedepan dan berkelanjutan (*sustainable*). Pemberdayaan yang harus dilakukan adalah bagaimana pemerintah

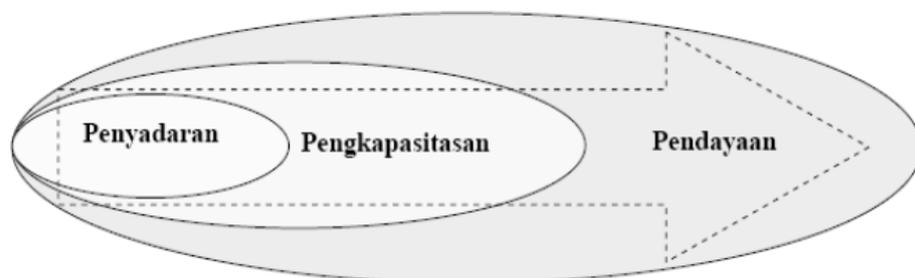
dan *stakeholder* berkerja mampu bersinergi menjalankan program-program pemberdayaan dengan mempertimbangkan nilai-nilai *social* kearifan *local* yang sudah ada.

c) Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Liyana(2011), pemberdayaan pada dasarnya merupakan suatu proses yang dijalankan dengan kesadaran penuh dan partisipasi penuh dari masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat untuk sumber daya pembangunan agar mampu mengenali permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan dan menolong diri menuju keadaan yang lebih baik.

Menurut Randy dan rianty (2007), pemberdayaan adalah sebuah proses menjadi bukan sebuah proses yang instan. Pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan.

Gambar 1.1
TAHAPAN PEMBERDAYAAN



Sumber : Randy R Wrihatnolo Dan Riant Nugroho Dwidjowijoto. "Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar Dan Panduan Pemenerdayaan Masyarakat,2007.

Dalam tahapan penyadaran sarannya yaitu masyarakat miskin diberikan pemahaman bahwa mereka mempunyai hak untuk menjadi berada. Di samping itu juga diberikan penyadaran bahwa kemampuan untuk keluar dari kemiskinan. Pada tahap ini masyarakat miskin dibuat mengerti bahwa proses pemberdayaan harus berasal dari mereka sendiri. Tahap pengkapasitasan bertujuan untuk memupukan masyarakat miskin sehingga mereka memiliki sebuah ketrampilan untuk mengelola peluang yang akan diberikan. Pada tahapan pengkapasitasan akan diberikan pelatihan-pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan *life skill*, pada tahap ini juga memperkenalkan dan membuka wawasan para warga tentang akses sumber daya kunci yang berada di luar komunitasnya agar menjadi jembatan mewujudkan harapan dan ekstensi dirinya. Tahap terakhir adalah tahap pendayaan, masyarakat miskin diberikan peluang yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan yang di tempuh dengan memberikan peran yang lebih secara bertahap sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas, diakomodasi aspirasinya serta di tuntut untuk melakukan *self evaluation* terhadap pilihan dan hasil pelaksanaan atas pilihan.

Sedangkan, menurut Pranaka dan priyono (Huri;2008) pemberdayaan ada 3 fase, guna untuk Pengentasan kemiskinan antara lain :

- a) Fase Inisial, pada fase ini semua proses pemberdayaan berasal dari pemerintah, oleh pemerintah dan di peruntukan untuk rakyat. Fase ini rakyat hanya bersifat pasif. Pada fase ini rakyat hanya melaksanakam apa yang di rencanakan oleh pemerintah atau *stakeholder* dan mereka tetap akan bergantung kepada pemerintah.
- b) Fase Partisipatoris, pada fase ini proses pemberdayaan berasal dari pemerintah dan bersama masyarakat, dan semua pemberdayaan diperuntukan untuk rakyat. Dalam fase ini masyarakat dilibatkan dalam kegiatan pembangunan untuk menuju kemandirian.
- c) Fase Emansipatoris, fase ini proses pemberdayaan nya berasal dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat dengan adanya dukungan pemerintah atau *stakeholder*. Pada masa fase ini masyarakat sudah menemukan kekuatan jati dirinya, sehngga dapat melakukan pembaruan, mengaktualisasikan diri.

Sedangkan menurut friedman (Huri:2008) ada dua tahap dalam pembaruan, yang pertama pemberdayaan inividu merupakan pemberdayaan keluarga dan setiap anggota keluarga. Kedua pemberdayaan kelompok merupakan *spiral model*, pada umumnya individu satu dengan yang lain saling berkaitan diikat satu keluarga. Demikian satu keluarga dengan satu keluarga lainnya

di ikat satu tatangga lainnya, menjadi kelompok masyarakat begitu seterusnya.

Telah disadari bahwa ketidakberdayaan masyarakat disebabkan dari banyak hal, yang pertama rendahnya pendidikan, keterbatasan akses social politik, dan lain-lain. Upaya pemberdayaan masyarakat terus menerus dilakukan oleh pemerintah, stakeholder, maupun masyarakat, ini dilakukan karena untuk mengurangi kelemahan yang ada dengan cara meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dan menyelamatkan sumber daya alam (SDA).

Keinginan untuk melakukan sebuah pemberdayaan demi menaggulangi kemiskian, bukanlah hal yang baru. Pemerintah atau stakeholder berupaya keras dari tahun ketahun dengan berbagai banyak program untuk pemberdayaan masyarakat miskin, missal melalui program IDT, P2KP, PKK, PNPM. Pengembangan swadayaan masyarakat selain memerlukan kebijakan *public* yang menyentuh kepentingan masyarakat, inisiatif dari masyarakat juga sangat penting di perlukan, misal program perkreditan, kredit investasi kecil dan lain lain.

Karena rata-rata masyarakat miskin itu ada di desa , maka cara pengentasan kemiskinan bisa dilakukan oleh pemerintah desa, dengan menggunakan Dana Desa. Dana Desa digunakan untuk membiayai program pemberdayaan masyarakat desa.

Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan menggunakan potensi dan sumber daya. Dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang di biyai oleh Dana Desa, dapat di pertimbangkan dengan adanya tipologi desa.

Berdasarkan Permendes Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Dana Desa, macam–macam tipologi Desa antara lain yaitu :

a) Desa Tertinggal atau Desa sangat tertinggal , memprioritaskan kesempatan pemberdayaan masyarakat desa untuk merintis ekonomi desa yang meliputi:

1. Pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok/BUMDesa/ BUMDesa bersama/lembaga ekonomi masyarakat desa, melalui pemberian akses modal, pengelolaan, produksi, distribusi, dan pemasaran bagian pertanian
2. Membuka lapangan kerja untuk pemenuhan hidup bagi masyarakat desa

b) Desa Berkembang , memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa untuk memperkuat lumbung ekonomi desa yang meliputi :

1. Penguatan usha ekonomi warga atau kelompok/BUMDes/BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi distribusi dan pemasaran, bagian usaha ekonomi

pertanian, usaha ekonomi ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang di fokuskan kepada kebijakan satu desa, produk unggulan.

2. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja trampil dan pembentukan wirausaha desa.
3. Pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat

c) Desa maju atau desa mandiri, memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk memperkuat lumbung ekonomi desa yang meliputi :

1. Penguatan usaha ekonomi warga atau kelompok/BUMDes/BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi distribusi dan pemasaran, bagian usaha ekonomi pertanian, usaha ekonomi ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang di fokuskan kepada kebijakan satu desa, produk unggulan.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja trampil, pembentukan wirausaha di desa, dan tenaga kerja ahli di desa
3. Perluasan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat desa.

Prioritas dana desa untuk pemberdayaan masyarakat selain berguna untuk program kegiatan pembangunan desa desa juga berguna untuk program kegiatan pemberdayaan desa, menurut Permendes No 22 Tahun 2016 Tentang Dana Desa, dijelaskan Dana Desa untuk membiayai program pemberdayaan yang tujuannya untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan menggunakan potensi dan sumber daya yang ada, Sehingga dapat menghidupkan desanya sendiri menjadi desa yang mandiri. Kegiatan pemberdayaan antara lain :

- a) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan dalam pembangunan Desa
- b) Pengembangan kapasitas masyarakat Desa
- c) Pengembangan ketahanan masyarakat Desa
- d) Pengembangan sistem informasi Desa
- e) Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas
- f) Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya

- g) Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama
- h) Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya
- i) Pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga
- j) Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Sedangkan menurut Nyimas(2014) prioritas penggunaan Dana desa pada program pemberdayaan terfokus pada beberapa kegiatan yaitu :

- a. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan magang.
- b. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya.
- c. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan

- d. Pengorganisasian masyarakat, fasilitas dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa.
- e. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat termasuk peningkatan kapasitas pengolahan posyandu, polindes, poskedes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis dan swamedikasi desa
- f. Dukungan terhadap kegiatan pantai/ hutan kemasyarakatan
- g. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat dengan energy terbaru dan pelestarian lingkungan hidup
- h. Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam masyarakat desa.

Telah dijelaskan bahwa kemiskinan adalah sebuah permasalahan yang dari tahun ketahun sudah ada. Kemiskinan yang ada bukan lah sebatas kemiskinan secara ekonomi, melainkan kemiskinan non ekonomi, seperti keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan keterampilan, produktivitas rendah, serta kurang keterbatasan kesempatan untuk berpartisipasi dalam hal pembangunan. Hal tersebut tidak bisa di selesaikan hanya melalui pembangunan ekonomi dan pembangunan finansil, melainkan melalui pemberdayaan agar mereka dapat mandiri dan mengubah nasibnya sendiri. Demkian pemerintah perlu berkerja sama dengan *stakeholder*, akedimisi, pemerintahan, LSM untuk bersama-sama

menempatkan permasalahan kemiskinan adalah permasalahan bersama.

Diatas tadi sudah diuraikan beberapa persoalan tentang kemiskinan, seperti dimensi kemiskinan, ciri-ciri kemiskinan, jenis kemiskinan dan di jelaskan pula kenapa kemiskinan itu bisa ditimbul. Upaya-upaya pemerintah untuk pengentasan kemiskinan menurut Suyanto (1996) bukan hanya bantuan ekonomi yang bersifat karitas saja, karena akan rawan dan memperlebar ketimpangan, sementara di sisi lain upaya upaya karitas dengan cara menyantuni masyarakat yang miskin sebagai objek amal justru akan menimbulkan ketergantungan banyak pihak, dan akan semakin meminimalisir pemberdayaan digolongan masyarakat.

Karena itu mengentaskan kemiskinan perlu dilakukan dengan cara frontal di semua sektor yang di perlukan adalah upaya-upaya yang memihak memberikan perlindungan, yang bukan sekedar persamaan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya dan membiarkan masyarakat miskin itu berjalan sendiri untuk menentaskan keterpurukan kemiskinannya .

Secara lebih rinci, ada empat prioritas yang harus di kembangkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Pertama memperkuat posisi tawaran dan memperkecil tawar dan memperkecil ketergantungan masyarakat miskin dari kelas sosial yang berada di atasnya dengan cara memperbesar kemungkinan

mereka melakukan diverifikasi usaha. Kedua, memberikan bantuan permodalan kepada masyarakat miskin dengan bunga yang rendah dan berkelanjutan. Ketiga, memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin untuk bisa ikut serta menikmati hasil dari keuntungan dari produknya dengan menetapkan kebijakan harga yang adil dan bisa menambah penghasilan keluarga. Keempat, mengembangkan kemampuan masyarakat miskin agar memiliki ketrampilan dan keahlian pada produk dan hasil usahanya.

Upaya penegentasan menurut Suyanto (1996), dianjurkan oleh pemerintah adalah pemberdayaan anatara lain adalah kebijakan yang memberikan ruang gerak, fasilitas *public*, dan kesempatan yang baik bagi tumbuhnya kemampuan dan kemungkinan kelompok masyarakat miskin untuk mengatasi masalah mereka sendiri , dan tidak untuk justru menekan kan dan mendesak mereka ke dalam posisi yang ketergantungan.

F. Definisi Konseptual

Definisi konsep adalah usaha untuk menjelaskan batasan pengertian antara konsep yang satu dengan yang lainnya. Karena sebuah konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian. Dalam penelitian ini, dapat diuraikan beberapa definisi konseptual yang akan digunakan yaitu antara lain:

a. Dana Desa

Dana desa merupakan anggaran belanja yang berasal dari APBN untuk desa yang berguna bagi pembangunan desa, bukan hanya pembangunan

fisik tetapi pembangunan non fisik. Dana desa, lalu di transfer melalui APBD kabupaten atau kota yang setiap tahun nya.. Dana Desa dialokasikan dalam bentuk transfer bukan dalam bentuk sebuah proyek. Dana Desa akan berjalan terus menerus selama UU desa berlaku. Penerimaan besar kecilnya Dana Desa berdasarkan karakteristik desa tersebut.

b. Kemiskinan

Kemiskinan adalah dimana seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok, sandang pangan nya. Tetapi mereka juga tidak bisa mengakses kesehatan, pendidikan dan fasilitas lain nya. Pengentasan Kemiskinan adalah upaya yang dilakukan untuk menangani masalah pokok dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di suatu tempat. Pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan cara stabilitas harga, program subsidi, bantuan *social* dan Dana Desa, serta pemberdayaan .

G. Definisi Operasional

Definisi oprasional yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atsa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Trasmigrasi Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa yaitu:

- a) Pelaksanaan Program dan kegiatan Pembangunan Desa
- b) Pemberdayaan masyarakat Desa
- c) Pelaksanaan Program kegiatan dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.

H. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Salim (2006) kualitatif adalah suatu metode berganda dalam focus, yang melibatkan pendekatan imperatif dan wajar terhadap setiap pokok permasalahan dikaji. Penelitian kualitatif menurut Denzin dan Linclon (Dalam Agus, 2006:34), melibatkan penggunaan dan penggunaan dan pengumpulan berbagai empiris seperti studi kasus, pengalaman pribadi, intrasioknal dan visual, yang menggambarkan moment rutin dan promblematis, serta maknanya dalam kehidupan individu dan kolektif.

Data dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata yang bersumber dari naskah dan hasil wawancara, hasil pencatatan dilapangan, dokumentasi-dokumentasi pribadi, catatan dari memo, dan dokumen yang resmi lainnya. Aspek yang menjadi maksud atau tujuan dari penelitian kualitatif yakni gambaran mengenai realita dari observasi dan pengalaman dibandingkan hanya melihat teori dibalik kejadian atau fenomena secara rinci, mendetail, dan rampung. Penerapan pendekatan kualitatif didalam suatu penelitian, dilakukan dengan menyesuaikan antara realita yang ada dilapangan dengan teori yang ada dengan menggunakan metode deskriptif.

Alasan mengapa memakai metode kualitatif karena kualitatif dapat memberikn rincian data yang lebih mendalam berupa kata-kata bukan hanya sekedar angka, mengenai pemanfaatan dana desa untuk pengetasan kemiskinan di Desa Candi Rejo menggunakan prespektif *holistic* atau

penelitian yang menyeluruh. Selain itu penelitian kualitatif lebih mengutamakan proses dibandingkan hasil, sehingga dalam proses pengambilan data dapat melihat hubungan antar variable yang saling mempengaruhi.

2.Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Candi Rejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten. Sasaran yang dituju adalah pemerintahan Desa Candi Rejo.

3. Jenis Data

Data dalam penelitian kualitatif dapat berupa kata-kata atau hasil dokumentasi dan observasi. Sumber data penelitian merupakan suatu hal yang pokok untuk dijadikan rekomendasi dalam menentukan metode pengumpulan data, jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Data Primer

Data Primer, adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan oleh pen informasi, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang di teliti dan subjek itu dapat dipercaya, yakni subjek penelitian atau informan yang berkenaan yang di peroleh secara langsung. Peneliti menggunakan data ini untuk medapat kan informasi terkait dengan Pemanfaatan dana desa untuk penentasan kemiskinan di Desa Candi Rejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten. Dalam penelitian ini data primer di peroleh melalui wawancara mendalam dengan tatap muka

santara peneliti dan informan. Informan di pilih berdasarkan pertimbangan bahwa informan dalam penelitian ini mengetahui secara baik tentang penggunaan Dana Desa untuk pengentasan kemiskinan Di desa Candi Rejo. Informan dalam penelitian ini meliputi :

- a. Kepala desa Candi Rejo : Ir. Muryanto Darmo Suwito
- b. Bendahara Candi Rejo
- c. Masyarakat yang menerima bantuan pemberdayaan masyarakat dari dana desa

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung penelitian atau data yang gunanya untuk melengkapi data primer . data sekunder di dapat dari sumber bacan yang terdiri dari dokumentasi arsip-arsip kantor Desa Candi Rejo. Data sekunder nya adalah : Data Realisasi Penggunaan Dana Desa 2015-2016, RKP Desa Candi Rejo, RPJMDes Candi Rejo.

4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pengentasan Kemiskinan Desa Candi Rejo ini dilaksanakan dengan cara berikut

a) Wawancara

Menurut Salim (2006:16) setidaknya terdapat dua jenis wawancara, yakni wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur, dalam wawancara

terstruktur, bahan–bahan wawancara di siapkan secara ketet sedangkan dalam wawancara tak truktur menghindari ketanya struktur bahan.

Untuk menghindari kehilangan informasi, maka para peneliti menggunakan alat perekam, sebelum melakukan wawancara mendalam peneliti menjelaskan atau memberikan arahan sekilas tentang gambaran dan latar belakang dan jelas mengenai *topic* penelitian pedoman wawancara yang dibuat adalah sebagai pengontrol (pegangan) bagi peneliti untuk membawa ke pokok persoalan. Dengan demikian, pelaksanaan wawancara sendiri tidak bersifat kaku.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan tanya jawab dengan informan yakni : Kepala Desa Candi Rejo : Ir. Muryanto Darmo Suwito, BPD Desa Candi Rejo, Bendahara Desa Candi Rejo, Penanggung Jawab program pemberdayaan masyarakat, masyarakat yang menerima bantuan pemberdayaan masyrakat dari dana desa. Maksud dari wawancara ini dilakukan untuk memperoleh dan melengkapi data yang di butuhkan pada penelitian penggunaan Dana desa untuk pengentasan kemiskinan.

b) Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra manusia, yakni melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan mengecap. Observasi ini digunakan untuk penelitian yang telah direncanakan secara sistematis tentang bagaimana pengentasan kemiskinan di Desa Candi Rejo.

Metode observasi digunakan untuk mengumpulkan data dari keadaan yang ingin diamati berupa keberhasilan pengentasan kemiskinan di Desa Candi Rejo. Observasi dilakukan secara langsung terhadap lokasi penelitian. Melalui teknik observasi langsung, pengumpulan data dilakukan dengan mengamati dan mencatat gejala-gejala yang tampak, serta pola perilaku subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi terus terang atau tersamar. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia melakukan penelitian.

c) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan sumber-sumber data sekunder yang berhubungan dengan masalah penelitian yang ada di lokasi penelitian. Dokumen ini berupa data-data penting yang berkaitan dengan pemanfaatan dana desa dalam pengentasan kemiskinan di Desa Candi Rejo. Teknik dokumentasi pada penelitian ini dengan cara pengumpulan penggunaan Dana Desa Tahun 2015-2016, RKP, RPJMDes, dan data Penerima bantuan Dana Desa.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data bersifat induktif, yakni analisis berdasarkan data yang di peroleh selanjutnya di kembangkan menjadi hipotesis. Teknik analisis data dilakukan dengan tahap yang dikemukakan Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiono (2013:19) yakni langkah sebagai berikut :

a) Reduksi Data

Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, tahapan ini peneliti memilih hal pokok yang berkaitan dengan pembelajaran yakni dengan menganalisis hal yang tertera pada instrument penilaian. Proses ini di mulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yakni wawancara, observasi, dokumentasi . setelah dikaji langkah berikutnya adalah membuat rangkuman data yang disebut abstrasi.

b) Penyajian Data

Selanjutnya dalam analisis data penyajian data berupa mendeskripsikan atau bentuk uraian singkat juga di dukung dengan grafik. Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan, sehingga menjadi informasi yang dapat terselesaikan dan tersimpulakan, memiliki makna tertentu dengan cara menampilkan hubungan antar variable.

Dari hasil reduksi data dimana memilah – milah data yang cocok dalam penelitian ini lalu tahap selanjutnya yaitu display data. Peneliti menuangkan segala informasi yang telah dipilih melalui reduksi data kedalam bentuk laporan penelitian . laporan ini di tunjukan kepada pembaca untuk memberikan informan pemanfaatan dana desa untuk pengentasan kemiskinan.

c) *Verification*

Langkah ketiga yakni penarikan kesimpulan dari temuan dilapangan. Untuk dapat menggambarkan dan menjelaskan kesimpulan yang memiliki makna teknik verifikasi, yakni menamai analisis secara spesifik dan menarik serta menjelaskan kesimpulan. penarikan kesimpulan berlangsung dengan tiga langkah (1) memikirkan ulang selama penulisan. (2) meninjau ulang catatan – catatan di lapangan. (3) melakukan upaya- upaya yang luas untuk menempatkan Salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

Setelah melakukan tahap reduksi dan penyajian data, barulah peneliti mengungkapkan sebuah kesimpulan dalam penelitian. peneliti menarik kesimpulan berdasarkan kenyataan yang di lapangan. peneliti mengungkapkan bagaimana pemanfaatan DANA DESA untuk pengentasan kemiskinan.

I.Sistematika penulisan

Untuk mempermudah membahas mengenai masalah dalam penulisan skripsi ini, maka telah disusun sistematika penulisan yakni sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan : bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi terdahulu, kerangka dasar teori. Definisi konseptual, definisi operasional metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Deskripsi Objek penelitian : pada bab ini akan membahas mengenai Desa Candi Rejo, letak geografisnya, *system* Pemerintahan Desa.

BAB III Pembahasan : dalam bab ini akan dikemukakan hasil dari penelitian dan analisis data yang mengenai pemanfaatan dana desa untuk pengentasan kemiskinan di Candi Rejo 2015-2016.

BAB IV Penutup : bab keempat ini terdiri dari dua hal yakni kesimpulan mengenai pemanfaatan dana desa untuk pengentasan kemiskinan di Candi Rejo 2015-2016, serta saran .

